

## **Kepentingan Pemerintah Pusat Dalam Pembangunan Infrastruktur Perbatasan Kalimantan Indonesia-Malaysia Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Tahun 2009-2014**

Oleh: Saiman\*

Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Malang

E-mail: saimanmhdris@gmail.com

### **Abstrak**

Ketertinggalan pembangunan di Kalimantan merupakan salah satu penyebab terjadinya permasalahan perbatasan Kalimantan Indonesia-Malaysia. Berdasarkan Undang-Undang tentang Wilayah Negara, negara bertanggung jawab dalam pembangunan perbatasan guna pencapaian masyarakat perbatasan yang sejahtera dan aman. Tulisan ini mengkaji kepentingan pemerintah pusat pada prioritas kebijakan dan kepentingan, peran dan power interplay antar lembaga serta nasionalisme. Berdasarkan metode kualitatif dengan studi kasus, bahwa peran Pemerintah (BNPP) hanya sebagai lembaga koordinator, terjadi ego sektoral antar lembaga. Kekuasaan pemerintah pusat sangat dominan, prioritas kebijakan dan kepentingan pemerintah meliputi faktor politik, keamanan dan strategis geografi, sehingga terjadi perubahan orientasi nasionalisme masyarakat perbatasan.

**Kata Kunci:** *kepentingan nasional, pemerintah pusat, pembangunan infrastruktur, perbatasan.*

### **Abstract**

Underdevelopment in Borneo was one of cause Indonesia-Malaysia border problems. According State Territorial Policy, state was to responsibility in border development for receive border komunities which prosperous and secure. This paper to test central and local government relatiios desentralisation era at policy priority and interests, role and power interplay of institutions, and nasionalism. According qualitative method and case studi, that government role as the coordinating institution, sectoral ego bithwin other institutions. Central government power very dominant and priority in policy and intersts central government, include politics factor, security and geografi strategic, so that happen orientation changes communities nationalism.

**Keywords:** *borderland, central government, infrastructure development, national interests.*

### **Pendahuluan**

Kawasan perbatasan memiliki peran sangat penting dan strategis, karena merupakan wilayah suatu negara yang menjadi batas kedaulatan negara dengan negara lain. Perbatasan juga merupakan wilayah yang merefleksikan halaman depan suatu negara, namun seringkali menimbulkan permasalahan yang sangat kompleks. Salah satu faktor penyebab terjadinya permasalahan kawasan perbatasan adalah akibat ketertinggalan pembangunan dengan negara tetangga. Indonesia memiliki wilayah perbatasan yang sangat luas dan berbatasan dengan 10 negara yaitu Malaysia, Papua Nugini, Singapura, Republik Demokratik Timor

---

\* Korespondensi: Saiman. Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Malang. E-mail: saimanmhdris@gmail.com.

Leste, India, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau dan Australia. Peran negara (pemerintah pusat) sangat dibutuhkan dalam pembangunan, menjaga keamanan kawasan perbatasan dan kedaulatan NKRI. Namun pemerintah pusat mengalami kendala dalam pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan.

Perbatasan Kalimantan adalah salah satu wilayah perbatasan Indonesia yang berbatasan dengan Malaysia sepanjang 2.004 km yang sering menimbulkan permasalahan antar negara. Permasalahan yang terjadi mulai dari yang bersifat sosial budaya seperti mengunjungi kerabat saudara di Malaysia tanpa dokumen resmi, masalah ekonomi seperti perdagangan ilegal, masalah politik dan keamanan seperti konflik antar negara yang dapat mengancam stabilitas perbatasan, nasionalisme dan kedaulatan NKRI.

Puncak masalah politik terjadi pada tanggal 17 Desember 2002, Mahkamah Internasional memutuskan bahwa Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi milik Malaysia. Pulau yang berjarak 15 mil sebelah timur, sehingga mempengaruhi perubahan batas negara dan aktivitas nelayan Kabupaten Nunukan. Tahun 2005, Malaysia mengklaim Blok Ambalat di Laut Sulawesi, sehingga terjadi manuver militer Indonesia-Malaysia (Madu, 2010:234). Tahun 2005, juga terjadi pergeseran patok batas Indonesia-Malaysia di Desa Aji Kuning Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan pada 4° 10' LU hasil perjanjian Inggris dan Belanda tahun 1928, sehingga selisih 4" yang berarti Indonesia kehilangan wilayah sekitar 103 hektar dan belum disepakati Malaysia (Iva Rachawati dalam Ludiro Madu, 2010:96). Pada tahun 2014, Malaysia mengklaim tiga desa yakni Desa Sinapadat, Simantipal dan Sinokod di Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan merupakan wilayah Malaysia (Republika, 15 November 2014). Sekitar 20 dari 85 kepala keluarga di Desa Samunti Lumbis memiliki kartu identitas Malaysia (*Mykad*) dan pindah ke Malaysia, karena desakan ekonomi, kebutuhan pendidikan dan minimnya pelayanan kesehatan (Republika, 15 November 2014).

Permasalahan perbatasan di Kalimantan sangat mengganggu kedaulatan NKRI. Hal ini terjadi karena keterbatasan kemampuan pengamanan wilayah perbatasan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih rendah serta akibat ketertinggalan pembangunan dengan negara Malaysia, sehingga terjadi lalu lintas orang, barang dan sumber daya alam yang merugikan NKRI. Meskipun saat ini perhatian pemerintah pusat terhadap isu-isu pembangunan perbatasan telah meningkat, namun secara faktual pembangunan perbatasan

masih terdapat sejumlah masalah. Pembangunan perbatasan sangat penting karena berkaitan dengan nasionalisme dan kedaulatan NKRI.

Kalimantan merupakan daerah yang sangat kaya sumber daya alam dan strategis secara geopolitik (Magenda, 1991:4). Perbatasan Kalimantan sangat memerlukan perhatian pemerintah pusat (negara) dalam pembangunan perbatasan, karena tiga dari lima provinsi di Kalimantan berbatasan dengan Malaysia (Peraturan Presiden RI Nomor 31 Tahun 2015:9). Posisi Kalimantan sangat penting dan strategis karena menjadi pintu gerbang bagi lalu lintas barang dan jasa, serta mobilitas penduduk, baik untuk kepentingan bisnis maupun tenaga kerja antara Indonesia dan Malaysia (Magenda, 1991:4). Masyarakat perbatasan lebih berorientasi kepada Malaysia, karena memiliki akses yang lebih baik sehingga masyarakat merasa lebih dekat, lebih mudah dan lebih murah daripada ke ibukota Kabupaten dan provinsi yang lebih jauh jaraknya.

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP), BNPP mempunyai tugas melaksanakan pembangunan perbatasan sesuai dengan Perpres Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014 dengan prioritas pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, infrastruktur daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik (Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010). Kebijakan prioritas nasional ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah pusat untuk melakukan pembangunan di perbatasan agar permasalahan perbatasan segera diselesaikan dan tidak menjadi ancaman bagi kedaulatan NKRI sesuai dengan visi terwujudnya perbatasan negara sebagai wilayah yang aman, tertib, dan maju (Peraturan BNPP Nomor 1 Tahun 2011:16-18) dengan pendekatan secara komprehensif pada tiga dimensi yaitu kesejahteraan, keamanan dan lingkungan (Peraturan BNPP Nomor 1 Tahun 2011:25).

Namun dalam konteks hubungan pemerintah pusat dan daerah, pelaksanaan kebijakan pembangunan infrastruktur perbatasan Era Pemerintahan Presiden SBY tahun 2009-2014 di Kalimantan mengalami beberapa masalah. Permasalahan pertama adalah tentang BNPP sebagai lembaga representasi negara yang mempunyai kekuasaan dalam pembangunan perbatasan berdasarkan Undang-Undang Wilayah Negara, tetapi mengapa

juga rasa kebanggaan pada negara. Pembangunan merupakan simbol kehadiran negara yang dapat meningkatkan rasa nasionalisme masyarakat terhadap negara dan wujud kedaulatan NKRI.

### **Kesimpulan**

Kepentingan Pemerintah Pusat dalam pembangunan infrastruktur perbatasan Kalimantan Indonesia-Malaysia era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2009-2014 masih menjadi dominasi pemerintah pusat yakni pada kementerian terkait, karena perbatasan menjadi tanggung jawab negara sehingga terjadi *power interplay* dan peran BNPP hanya koordinatif. Terjadi perbedaan prioritas dan kepentingan pusat, karena Pemerintah Pusat masih fokus pada aspek politik, keamanan dan kedaulatan NKRI.

Dengan demikian pembangunan infrastruktur perbatasan Kalimantan Indonesia-Malaysia era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2009-2014 belum memberikan dampak signifikan pada kemajuan daerah perbatasan dan kesejahteraan masyarakat kawasan perbatasan Kalimantan Indonesia-Malaysia.

### **Saran**

1. Pemerintah pusat sebaiknya membuat regulasi tentang pembagian kekuasaan kepada pemerintah daerah kabupaten perbatasan dalam pembangunan infrastruktur perbatasan, sehingga azas otonomi daerah berjalan dengan baik pada kabupaten perbatasan. Semacam “Otonomi Perbatasan” yakni kewenangan tertentu yang diperoleh pada kabupaten perbatasan untuk mempercepat proses pembangunan perbatasan.
2. Pemerintah pusat sebaiknya membuat regulasi yang dapat memperkuat peran dan fungsi BNPP, sehingga pembangunan infrastruktur perbatasan dapat dilaksanakan dengan segera dan baik guna mencapai kesejahteraan masyarakat, keamanan dan kedaulatan NKRI

### **Daftar Pustaka**

#### **Buku:**

- Andrews, Colin Mac dan Ichlasul Amal (ed). 1993. *Hubungan Pusat-Daerah Dalam Pembangunan*. Jakarta. Rajawali Grafindo Persada.
- Bakri, Suryadi Umar. 1999. *Pengantar Hubungan Internasional*. Jakarta. Jayabaya University Press.
- Budiarjo, Miriam. 2004. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta. Gramedia Pustaka.
- Chandhoke, Neera. 1995. *Benturan Negara dan Masyarakat Sipil*. Istawa. Yogyakarta.
- Citrawijaya, Supoduto. 2005. *Kompi X di Rimba Siglayan: Konfrontasi dengan Malaysia*, Jakarta Penerbit Buku Kompas.
- Heaton, Chris dan Ernest Renan. 1990. *20<sup>th</sup> Century Thinker on Nationalism and 19<sup>th</sup> Century Orientalist*. United Kingdom. Departement of Theoretical and Applied Linguistic, University of Edinburgh.
- Jemadu, Aleksius. 2008. *Politik Global Dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Jenkins, W.I. 1978. *Policy Analysis* Oxford. Martin Robertson.
- Kahin, George McTurnan. 1980. *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajar Malaysia.
- Kellas, James G. 1998. *The Politic of Nationalism and Ethnicity*. Macmillan Press Ltd.
- Madu, Ludiro, at.al. 2010. *Mengelola Perbatasan Indonesia di Dunia Tanpa Batas: Isu, Permasalahan dan Pilihan Kebijakan*. Jakarta. Graha Ilmu.
- Magenda, Burhan D. 1991. *East Kalimantan; The Decline Of A Commercial Aristocracy*, Cornell Modern Indonesian Project, Cornell University. New York. Ithaca.
- Miliband, Ralph. 1969. *The State in Capitalist Society*. New York. Basic Book Inc.
- Moeldoko. 2014. *Kebijakan dan Scenario Planning Pengelolaan Kawasan Perbatasan di Indonesia 2030: Studi Kasus Perbatasan Darat di Kalimantan*. Jakarta. Disertasi Program Ilmu Administrasi FISIP UI.
- Persons, Wayne. 2008. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktek Analisa Kebijakan*. Kencana. Jakarta.
- Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014. 2012. *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta. Sekrtariat Jenderal MPR RI.
- Pressman, J. dan Wildavsky A. 1984. *Implementation*. Berkeley. University of California Press.
- Skocpol, Theda. 1991. *Negara dan Revolusi Sosial: Suatu Analisis Komperatif Tentang Perancis, Rusia dan Cina*. Jakarta. Erlangga.

- Shabbir, Cheema, G. and Dennis Rondinelli. 1983. *Decentralization and Development Policy Implementation in Developing Countries*. Beverly Hills/London/New Delhi. Sage Publications.
- Smith, Brian C. 1985. *Decentralization: The Territorial Dimension of The State*. London. George Allen and Unwin.
- Subarsono, A.G. 2009. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Wahab, Sholichin Abdul. 2001. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Wetherly, Paul. 2005. *Marxism and The State Analytical Approach*. New York. Palgrave Macmillan.
- Wardhani, Baiq L.S.W. 2010. Revisi Teritorial, Eksternalisasi Konflik Etnis dan Keamanan Perbatasan, dalam Ludiro Madu, dkk. 2010. *Mengelola Perbatasan Indonesia di Dunia Tanpa Batas: Isu, Permasalahan dan Pilihan Kebijakan*. Jakarta. Graha Ilmu

#### **Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah :**

- Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara.
- Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2010 Tentang BNPP.
- Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 Tentang RPJM Nasional 2010-2014.
- Peraturan Presiden RI Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan.
- Peraturan BNPP Nomor 1 Tahun 2011 Tentang *Grand Design* Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2025.
- Peraturan BNPP Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Tahun 2011-2014.
- Peraturan BNPP Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Tahun 2012, Tanggal : 6 Januari 2012
- Peraturan BNPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2013, Tanggal 28 Januari 2013.
- Peraturan BNPP Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2014, Tanggal 11 April 2014.

Berita Negara RI Nomor 44 Tahun 2011, Peraturan BNPP Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2025.

Departemen Kehutanan, 2002. Rencana Pengelolaan Taman Nasional Krayan Mentarang 2002-2025. Direktorat Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Jakarta.

Keputusan Kepala BNPP Nomor 816.05-115 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.

Risalah RDP Komisi II DPR RI dengan Sekjen Kemendagri dan Sekretaris BNPP (RKA K-L Tahun 2012) tertanggal 21 Oktober 2011.

Risalah Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan BNPP tanggal 27 Januari 2012,

Risalah Rapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri dan Kepala BNPP tanggal 6 Maret 2012.

#### **Harian Surat Kabar dan Media**

*Desa Diklaim, RI Tempub Jalur Hukum.* Republika. 15 November 2014.

*Sulitnya Hidup Layak di Tanah Air.* Republika. 15 November 2014.

*TNI Bangun bandara di perbatasan Malaysia,* 23 April 2012 dalam [http://klippinghankam.com/2012\\_04\\_01\\_archive.html](http://klippinghankam.com/2012_04_01_archive.html) diakses tgl 20 Sept 2012.

<http://www.bappeda.kaltim.go.id/miliaran-untuk-masyarakat-krayan.htm> diakses tanggal 28 Febuari 2013.

<http://www.diskominfo.kaltimprov.go.id> diakses tanggal 19 Oktober 2015.

<http://www.wwf Indonesia Krayan Mentarang, 2014>.